

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur adalah rencana pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Timur yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur yaitu Visi, Misi Gubernur Jawa Timur terpilih Tahun 2015–2019, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu tahun 2014-2019 diantaranya sebagai berikut :

1. Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan
2. Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Konservasi serta Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas;
3. Program Pengelolaan Air Tanah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Secara sistimatis Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dimana dalam penyusunannya mempunyai keterkaitan dengan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Renstra seluruh SKPD sejenis/terkait di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Jawa Timur,
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panas Bumi;
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan ;
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11;
27. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dimaksudkan yaitu :

1. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
2. Penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 kedalam Renstra SKPD untuk perencanaan 5 tahun disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan diberlakukannya otonomi daerah.

2) Tujuan

Sedangkan tujuan dari pada disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Timur, adalah :

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2014–2019 dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan;
2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Strategi dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan sebagai berikut :

Tugas Pokok.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (**Lampiran 1** Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Penyusunan Program
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertambangan Umum dan Migas, membawahi :

1. Seksi Inventarisasi Sumber daya Mineral dan Migas;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas
 3. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas
- d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :
1. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan
 3. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan
- e. Bidang Air Tanah, membawahi :
1. Seksi Inventarisasi Air Tanah;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah
 3. Seksi Pengawasan Air Tanah
- f. Bidang Geologi, membawahi :
1. Seksi Inventarisasi Geologi;
 2. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 3. Seksi Geologi Tata Lingkungan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan sekelompok Jabatan Fungsional yang masing – masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan , mengkoordinasikan dan menegendalikan kegiatan administrasi umum dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasin umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Sub Bag Tata Usaha

- 1) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- 2) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 3) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- 4) Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya.
- 5) Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bag Keuangan

- 1) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- 2) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- 3) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bag Penyusunan Program

- 1) menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- 2) melaksanakan pengolahan data;
- 3) melaksanakan perencanaan program;
- 4) menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- 5) menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi;

- 7) melaksanakan penyusunan laporan;
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pertambangan Umum dan Migas

Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas.

Mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi sumberdaya mineral dan migas;
- b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi pertambangan umum dan migas;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang pertambangan umum dan migas;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan umum dan migas;
- 3) menyiapkan bahan inventarisasi potensi dan menyusun neraca sumberdaya mineral;
- 4) menyiapkan bahan penelitian sumberdaya mineral dan migas dalam rangka pengembangan pemanfaatan, pengembangan teknologi, pengolahan dan pemurnian;
- 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas.

- 1) Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertambangan umum dan migas dan izin operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan.
- 2) Menyiapkan bahan pemberian izin usaha badan usaha jasa pertambangan umum dan migas, dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota;
- 3) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha pertambangan umum dan migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 4) Menyiapkan bahan rekomendasi dan izin pembelian, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak dan bahan cair berbahaya;

- 5) Menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota;
- 6) Menyiapkan bahan inventarisasi jumlah usaha kegiatan hilir yang beroperasi di wilayah provinsi;
- 7) Menyiapkan bahan penetapan harga BBM jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil;
- 8) Menyiapkan bahan penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan penilaian (assessment) sub bidang migas;
- 9) Menyiapkan bahan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas

- 1) Menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan umum dan migas dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota;
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan umum dan migas pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas pada wilayah lintas kabupaten/kota yang berdampak regional atau berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
- 4) Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan teknis bidang pertambangan umum dan migas untuk aparat kabupaten/kota dan pemberian izin Kartu Izin Meledakkan (KIM);
- 5) Melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga BBM dari agen ke pangkalan sampai ke konsumen;
- 7) Menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang migas untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi, jasa boga, jasa penyedia material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual;
- 8) Menyiapkan bahan pengawasan jumlah armada pengangkut BBM dan pencatuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan.

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang energi dan ketenagalistrikan;
- 2) Melaksanakan inventarisasi, survei serta penelitian potensi energi dan ketenagalistrikan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi energi dan ketenagalistrikan;
- 4) Menyiapkan bahan pengembangan teknologi pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya energi;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
- 2) Menyiapkan pemberian izin usaha ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota;
- 3) Menyiapkan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dan pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi;
- 4) Menyiapkan bahan peningkatan penyediaan listrik pedesaan dan kepulauan;
- 5) Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- 6) Menyiapkan bahan pemberian izin badan usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas kabupaten/kota;
- 7) Menyiapkan bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKs kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi;

- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan

- 1) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh provinsi;
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi;
- 3) Menyiapkan bahan monitoring, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hemat energi dan konservasi energi;
- 4) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi, pada wilayah lintas kabupaten/kota atau yang berdampak regional;
- 5) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) panas bumi lintas kabupaten/kota;
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;

4. Bidang Air Tanah

Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi air tanah, pemanfaatan dan konservasi air tanah serta pembinaan dan pengawasan air tanah.

Bidang Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi air tanah (penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota);
- b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi air tanah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah lintas kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Inventarisasi air tanah

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah;
- 2) menyiapkan bahan inventarisasi potensi air tanah pada cekungan air tanah (CAT) lintas kabupaten/kota;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya air tanah;
- 4) menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan penyelidikan dan pengembangan air tanah daerah sulit air;
- 6) menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi air tanah;
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pemanfaatan dan konservasi air tanah

- 1) menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air dan izin pengambilan mata air serta pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 2) menyiapkan bahan penetapan kawasan resapan air tanah dan membuat imbuhan buatan pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten /kota;
- 3) menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau pada wilayah cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan zona konservasi air tanah pada CAT lintas kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Pengawasan Air Tanah :

- 1) menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparaturnya pengelola air tanah, pelaksana pengeboran air tanah dan pengguna air tanah;
- 2) menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknik untuk izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air, dan izin pengambilan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 3) menyiapkan bahan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah lintas kabupaten/kota;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Geologi

Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, lingkungan geologi dan pengembangan wilayah.

Bidang Geologi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi geologi pada wilayah provinsi;
- b. pelaksanaan dan koordinasi sub bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- c. penyusunan pedoman pengelolaan lingkungan geologi dan pengembangan wilayah pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Inventarisasi Geologi:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang kegeologian;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi geologi;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan kars dan kawasan lindung geologi;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geologi;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi :

- 1) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan subbidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi yang berdampak lintas kabupaten/ kota;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kawasan rawan bencana gunung api dan geologi;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan pada daerah-daerah rawan bencana geologi;
- 7) menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan lokasi bencana geologi serta memberikan saran penanggulangannya;
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi rawan bencana geologi;
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Geologi Tata Lingkungan :

- 1) menyiapkan bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan kars dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan penyelidikan, rekayasa teknologi, rancang bangun dan permodelan untuk lingkungan geologi dan geologi teknik;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan lingkungan geologi dan geologi teknik;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan lindung geologi;
- 5) menyiapkan bahan rekomendasi konservasi dan kawasan lindung geologi;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi geologi lingkungan;
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan;
- 2) Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- 3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
- 4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tmt. Januari 2013 berjumlah 111 orang, dengan klasifikasi sebagaimana **Tabel 1.**

Tabel 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil, per Januari 2013

NO.	PENDIDIKAN/ JURUSAN	GOL. IV		GOL. III		GOL. II		GOL. I		JUMLAH PEGAWAI		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	19	2	-	3	-	-	-	-	19	5	24
	1. Magister Managemen	12	1	-	3	-	-	-	-	12	4	16
	2. Magister Engineering	7	1	-	-	-	-	-	-	7	1	8
2.	Sarjana (S-1)	-	-	38	15	-	-	-	-	38	15	53
	1. Teknik Geologi	-	-	4	1	-	-	-	-	4	1	5
	2. Teknik Sipil	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	3. Teknik Elektro	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	4. Teknik Geodesi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	5. Teknik Lingkungan	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	6. Administrasi Negara	-	-	9	5	-	-	-	-	9	5	14
	7. Geografi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	8. Hukum Perdata	-	-	11	1	-	-	-	-	11	1	12
	9. Ekonomi	-	-	6	4	-	-	-	-	6	4	10
	10. Ilmu Politik	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	3
	11. Keuangan	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
3.	Sarmud / D-3	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	8
	1. Sarmud/Tambang	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
	2. D3/Ekonomi Pembangunan	-	-	1	4	-	-	-	-	1	4	5
	3. D3/Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	SLTA	-	-	16	6	4	-	-	-	20	6	26
	1. STM(Geologi/Tambang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. STM/Mesin	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	3. STM/Listrik	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	4. STM/Elektro	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	5. STM/Bangunan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	6. STM/Teknologi Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. SMA/IPA	-	-	6	-	2	-	-	-	8	-	8
	8. SMA/IPS	-	-	5	3	2	-	-	-	7	3	10
	9. SMAK/Analisis Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. SMEA/Tata Niaga	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
	11. SMEA/Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KESELURUHAN	19	5	58	28	4	0	0	0	81	30	111

Sarana dan prasarana aset Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang telah dilampirkan (**Lampiran 2.** Buku Inventaris).

3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur serta indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah. (**Lampiran 3,** Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD) dan (**Lampiran 4,** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD).

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none"> Regulasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih kurang lengkap terutama perda-perda yang belum disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Banyak potensi sumber daya mineral logam dan non logam di Jawa Timur.
<ul style="list-style-type: none"> Usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan teknik pertambangan yang benar dan berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya perekonomian masyarakat.
<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tenaga pengawas teknis di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan yang ada di provinsi terlebih di kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kemampuan SDM di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
<ul style="list-style-type: none"> Masih dominannya pemanfaatan BBM pada untuk Pembangkit Tenaga Listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya energi alternatif pengganti minyak tanah untuk rumah tangga yang memerlukan kajian lebih lanjut
<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak penduduk di daerah terpencil belum menikmati listrik, sehingga rasio elektrifikasi di Jawa Timur baru mencapai 77,16 %. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air , angin dan panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal.

Tantangan	Peluang
<ul style="list-style-type: none"> Lokasi potensi sumber daya alam pada umumnya terletak di daerah-daerah terpencil sehingga dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana untuk dapat menjangkau lokasi tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin meningkatnya permintaan/ penggunaan energi listrik di Jawa Timur.
<ul style="list-style-type: none"> Tumpang tindih sektor pertambangan dengan kepentingan sektor lain, seperti perkebunan, kehutanan, pariwisata, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Peluang ekspor mineral logam dan batuan yang besar serta pengelolaan panas bumi
<ul style="list-style-type: none"> Isu lingkungan yang semakin deras digulirkan LSM ataupun non government organization. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan ESDM yang terus meningkat.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain:

- 1) Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumberdaya mineral yang cukup besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Banyak potensi mineral, dan bahan galian kontruksi yang belum diketahui nilai depositnya secara akurat.
- 3) Belum dimanfaatkannya sumberdaya mineral, air tanah dan panas bumi secara maksimal.
- 4) Belum tersediannya data dan informasi mengenai pengolahan air tanah, lingkungan geologi dan kawasan pertambangan dan peta daerah rawan bencana geologi melalui optimalisasi, inventarisasi, pengelolaan dan pemetaan.
- 5) Data dan informasi geologi belum diterapkan untuk pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah.
- 6) Potensi air tanah di Jawa Timur cukup besar tetapi penyediaan air bersih bersumber dari pengeboran air tanah untuk kebutuhan masyarakat di daerah sulit air belum maksimal dilaksanakan.
- 7) Banyaknya daerah sulit air di Provinsi Jawa Timur yang belum ditanggulangi.
- 8) Belum terpetakannya daerah sulit air di Provinsi Jawa Timur.
- 9) Banyaknya permintaan masyarakat yang tinggal di daerah sulit air bersih untuk dibangun sumur bor, tetapi belum semuanya dapat dipenuhi.
- 10) Regulasi pemanfaatan air tanah belum diatur dengan jelas, sehingga pembatasan pengambilan air tanah belum bisa dilaksanakan.
- 11) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral.
- 12) Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB masih rendah.

- 13) Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang.
- 14) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat.
- 15) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
- 16) Banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain (Pemanfaatan lahan ganda).
- 17) Adanya perbedaan persepsi dalam penyelenggaraan pengelolaan sektor pertambangan.
- 18) Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota.
- 19) Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian.
- 20) Masih Rendahnya Ratio Elektrifikasi dan Rasio Desa berlistrik.
- 21) Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar minyak.
- 22) Masih terjadi ketidak seimbangan antara penyediaan dan kebutuhan energi.
- 23) Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan masih terbatas.
- 24) Masih terjadi kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi terutama di wilayah kepulauan.
- 25) Kelangkaan BBM masih tergantung transportasi.

2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1) Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah Tahun 2015 – 2019 yaitu

**“JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI,
BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK”**

Sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Jawa Timur bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Jawa Timur lebih sejahtera.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Jawa Timur Lebih Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktur, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tentram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tentram, damai, sentosa, dan makmur.

Jawa Timur Lebih Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang ,merata bagi semua orang bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat. Yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah

atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangan berdayaan menghadapi yang kuat. Keberhasilan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jawa Timur Lebih Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian.

Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan “Berdikari” (*berdiri di atas kaki sendiri*), dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawa Timur Lebih Berdaya Saing

Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comperative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Khususnya menghadapi *ASEAN Economi Community* pada 2015.

Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkaitan dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi *ASEAN Socio-cultural Community* pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan bumi oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, di perkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa

menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi loka yang merupakan kearifan loka (*local wisdom*) harus pula di pelihara, diperkuat, dan di kembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan loka merupakan pengetahuan setempat (*indigenous or local knowlegde*), atau kecerdasan loka (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural indentity*).

Jawa Timur Lebih Berakhlak

Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budipekerti, perangai, tabiat, atau moralitasluhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang di yakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehansosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

karenanya pembangunan Jawa Timur juga di tunjukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan, serta kesejahteraan. Jawa Timur untuk Indonesia.

5.2 MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” tersebut, ditempuh melalui lima misi yang di beri judul: **“Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”**. Judul atau lebel misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas

pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Label “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” yang membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 tersebut, menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejalan dengan visi, misi dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih (2014-2019) kepada elemen masyarakat yang lemah, sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” tersebut, bersifat inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi *wong cilik*, atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.

Wong Cilik yang dimaksud disini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), terdevaluasi (*silencing*) dalam proses pembangunan, yang secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpandu. Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Lima misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing. Dan Berakhlak” adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Meningkatkan Kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi kedua: meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inkulif) sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/ agroindustri, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pertahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri argo maupun non-argo, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya asing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5.3 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 5.1:

3. Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Visi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2010- 2014, yaitu :

Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi KESDM, yaitu :

1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi geologi.
3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.
5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral.
6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan mineral secara daya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM.
8. Meningkatkan kualitas SDM sektor ESDM.
9. Melaksanakan Good Governance.

Program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut :

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KESDM ;
2. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara KESDM ;
3. Pengelolaan dan penyediaan Minyak dan Gas bumi ;
4. Pengelolaan Listrik dan pemanfaatan energi ;
5. Pembinaan dan pengusaha Mineral, , Panas bumi dan Air tanah ;
6. Penelitian dan Pengembangan ESDM ;
7. Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi ;
8. Pendidikan dan Pelatihan ESDM ;
9. Pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa I
10. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Dewan Energi Nasional.

4. Penentuan Isu-Isu Strategis SKPD

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun (2015-2019) mendatang adalah sebagai berikut:

Isu – isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

1. **Potensi energi baru terbarukan di Jawa Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi panas bumi masih mengalami kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan dan kurang dukungan infrastruktur.**

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, panas bumi,

biomassa dan gelombang laut; berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Potensi energi air terinventarisasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 80 MW, suatu potensi yang tidak kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.
- Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Untuk Jawa Timur intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 8.583,9 Wh/m² sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaik atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut.
- Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, secara umum kecepatan angin rata-rata 2-6 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 5-27 knot.
- Potensi energi panas bumi di Jawa Timur yang telah teridentifikasi yaitu di daerah Blawan-Ijen (110 MWe), Telaga Ngebel (165 MWe), Iyang-Argopuro (295 MWe) , Gunung Pandan (25 MWe) Gunung Arjuno – Welirang (130 MWe) , Gunung Kawi – Songgoriti (25 MWe) , Tiris (147 MWe), Melati dan Arjosari Pacitan (50 MWe) , dengan total potensi sebesar 1.147 Mwe, sedangkan Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Timur - Jawa Tengah (lintas provinsi) memiliki potensi sebesar 475 Mwe. Lokasi yang telah memiliki ijin adalah Blawan – Ijen, Telaga Ngebel dan Argopuro, namun sampai sekarang belum melakukan eksploitasi dan menghasilkan listrik.
- Potensi energi biogas di Provinsi Jawa Timur dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau, maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, pengumpulan data dan analisa yang dilakukan maka potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat

dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 6.084.067,95 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 55.309.708,64 kWh.

2. Rasio Elektrifikasi dan efisiensi openggunaan listrik di Jawa Timur belum optimal; Sementara potensi energi baru terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan.

- Kapasitas terpasang pembangkit listrik PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sampai akhir Desember 2007 mencapai 14,87 MW, dengan 49 unit pembangkit dan jumlah penyulang 863 buah dengan rincian, PLTD 26 unit dengan kapasitas terpasang total 12,42 MW; PLTM tiga unit (2,45 MW); Panjang Jaringan Tegangan Menengah 29.929,27 Kms; Panjang Jaringan Tegangan Rendah 57.989,21 Kms; dan total Gardu Distribusi 20 kV 36.275 unit, dan 4.274,02 MVA.
- Jumlah transfer tenaga listrik dari PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali, PLTD, PLTM, PLTD sewa, dan pembangkit swasta lainnya pada tahun 2007, sebanyak 21.163.305 MWh. Jumlah tersebut meningkat 5,53 % jika dibandingkan tahun 2006.

3. Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)

Komoditas tambang Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Timur tersebar di 35 Kab/Kota, terdapat pada 28 Kecamatan dengan jumlah PETI sebanyak 82 lokasi dan areal PETI seluas sekitar 1.438 Hektar

4. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.

Pengelolaan Mineral adalah usaha pertambangan mineral yang telah dilakukan di Jawa Timur baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Di Provinsi Jawa Timur jumlah izin pertambangan yang telah diterbitkan oleh Gubernur sampai dengan tahun 2013 sebanyak 356 terdiri dari : IUP Eksplorasi 1 izin ; Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebanyak 5 izin; IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Penjualan sebanyak 326 izin; IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan Pemurnian sebanyak 9 izin; Izin Usaha Jasa Pertambangan sebanyak 4 izin; Izin Gudang Handak sebanyak 2 izin; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebanyak 7 izin; Rekomendasi Pembelian Handak sebanyak 4 izin; Pengangkatan Kepala Teknik Tambang sebanyak 2 izin, dan Kartu Izin Meledakkan (KIM) sebanyak sebanyak 3 (tiga) izin.

Sedangkan IUP dan IPR yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota se Jawa Timur sampai dengan tahun 2013 sebanyak 442 izin.

Dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran Produksi dan Iuran Tetap) Jawa Timur (Prov/Kab/Kota) tahun 2013 masih sangat rendah. Komoditas tambang dari hasil kegiatan penambangan yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam Negeri dan sebagian untuk di ekspor ke Luar Negeri.

5. Percepatan peningkatan produksi gas bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, Kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah kepulauan dan distribusi LPG 3 kg. Masih belum tepat sasaran.

- Saat ini di Provinsi Jawa Timur terdapat 39 Wilayah Kerja (WK) migas, yang berstatus produksi 10 WK dan yang berstatus eksplorasi/pengembangan sebanyak 29 WK. Sedangkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi sebanyak 32 KKS.
- Sampai dengan bulan Juli tahun 2013, rata-rata produksi minyak bumi sebesar 387,054 *Barrel Oil Per Day* (BOPD) dan rata-rata produksi gas bumi sebesar 624,35 *Million Metric Standard Cubic Feet per Day* (MMSCFD)
- Dalam rangka menarik minat investor ke Provinsi Jawa Timur, saat ini telah dibentuk Kawasan Industri berbasis gas, seperti Kawasan Industri Tuban (KIT) di Tuban, Kawasan Industri Maspion (KIM) dan Kawasan Industri Gresik (KIG) di Gresik, Kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) di

Mojokerto, Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Pasuruan, Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Surabaya, Kawasan Industri Sidoarjo Industrial Estate di Sidoarjo, Kawasan Industri Jombang di Jombang, dan Kawasan Industri Lamongan di Lamongan.

- Pemanfaatan gas untuk Rumah Tangga (*City Gas*), yang saat ini telah mencapai 12.000 Saluran Rumah (SR) baik di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.
- Potensi Sumur Tua di Wilayah Jawa Timur cukup potensial untuk diusahakan oleh KUD atau BUMD, yang terletak di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Sampai dengan tahun 2013 Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua sebanyak 6 (enam), yang terdiri dari : Kabupaten Tuban 1 (satu), Kabupaten Bojonegoro 3 (tiga) Kabupaten Gresik 1 (satu), Kabupaten Sumenep 1 (satu)

6. Belum optimalnya informasi hidrogeologi dan sumberdaya air tanah dalam rangka menunjang investasi dan konservasi air tanah, juga belum optimalnya pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air.

Jawa Timur memiliki 23 (dua puluh tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) terdiri dari 5 cekungan dalam wilayah kabupaten, 14 cekungan lintas wilayah kabupaten dan 4 Cekungan lintas wilayah provinsi, yaitu :

1. Cekungan Air Tanah berada dalam dalam satu wilayah Kabupaten/kota : CAT Sumberbening, CAT Banyuwangi, CAT Blambangan, CAT Bangkalan dan CAT Toranggo
2. Cekungan Air Tanah berada lintas Kabupaten / Kota : CAT Surabaya - Lamongan, CAT Tuban, CAT Panceng, CAT Brantas, CAT Bulukawang, CAT Pasuruan, CAT Probolinggo, CAT Jember – Lumajang, CAT Besuki, CAT Bondowoso – Situbondo, CAT Wonorejo, CAT Ketapang, CAT Sampang – Pamekasa, CAT Sumenep.

3. Cekungan Air Tanah berada lintas provinsi : CAT Wonosari, CAT Lasem, CAT Randublatung, CAT Ngawi – Ponorogo.

Potensi airtanah dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : airtanah bebas sebesar 15.377 Juta m³/tahun dan airtanah tertekan sebesar 985 Juta m³/tahun

7. **Belum optimalnya informasi geologi dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumber daya geologi dan pengembangan wilayah.**

Berdasarkan kondisi geologi, fisografi wilayah Provinsi Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 jalur yaitu :

1. Jalur Utara membujur arah barat ke timur dari Tuban, Bojonegoro sampai dengan Pulau Madura berupa perbukitan batugamping yang kaya bahan tambang migas, batugamping, pasir kuarsa dan lain-lain;
2. Jalur tengah membujur dari barat ke timur dari Ngawi, Magetan sampai dengan Situbondo, Banyuwangi merupakan rangkaian gunung berapi yang kaya akan bahan galian bangunan, mineral logam, airtanah, dan panas bumi;
3. Jalur selatan membujur dari barat ke timur dari Pacitan sampai Banyuwangi merupakan rangkaian perbukitan struktural yang kaya sumber daya mineral baik logam maupun non logam.

Informasi geologi secara menyeluruh sangat diperlukan dalam upaya pengembangan wilayah, namun demikian keberadaan informasi geologi di Jawa Timur masih sangat terbatas.

8. **Belum optimalnya informasi terhadap mitigasi bencana geologi dan lingkungan geologi.**

Akibat dari suatu kegiatan pembangunan akan timbul berbagai dampak terhadap lingkungan setempat baik dampak positif maupun dampak negatif, yang sangat erat berkaitan dengan pemanfaatan dan produktivitas sumber daya alam serta kondisi geologi setempat. Apabila tidak ditanggulangi dengan baik kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang tidak teratur dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan intensitas terjadinya bencana (geologi) seperti longsor dan lain-lain. Disamping itu, dengan seringnya terjadi bencana tanah longsor baik pada daerah dengan kerentanan gerakan tanah tinggi

maupun sedang, maka kedepan diperlukan pemetaan resiko bencana kegeologian.

Dalam beberapa tahun terakhir ini pembangunan berbagai bidang di Jawa Timur berlangsung dengan pesat, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Interaksi dari lajunya pembangunan ini harus didukung oleh ketersediaan lahan (wilayah) yang baik. Sedangkan keberadaan suatu lahan diatas bumi ini tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor geologi, baik sebagai produk yang menguntungkan maupun yang merugikan. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi diharapkan dapat memberikan masukan atau memecahkan masalah terutama untuk perencanaan pengembangan wilayah.

9. Kurangnya Sumber Daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.

Globalisasi menuntut adanya kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam mendukung operasional kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Sebagai unit pelayanan baik administrasi maupun sarana prasarana pendukung membutuhkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di dalam mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi guna mengikuti kecepatan informasi terutama dalam administrasi maupun pelayanan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. Saat ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur masih kekurangan SDM dan sarpras pendukung baik di administrasi maupun tenaga teknis yang mempunyai latar belakang energi dan sumber daya mineral.

Isu – isu strategis tersebut merupakan akumulasi isu – isu strategis dari unit - unit yang ada di dalam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, antara lain :

A. Isu Strategis Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Isu Strategis bidang ini adalah Belum optimalnya pemanfaatan Potensi energi terbarukan; Pengembangan energi panasbumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan dan kurang dukungan infrastruktur. Di bidang Ketenagalistrikan isu strategisnya adalah : 22,84 %

masyarakat di Jawa Timur belum menikmati listrik PLN, karena Rasio Elektrifikasi (RE) sekitar 77,16 % (Mei 2013); Efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal. Potensi energy terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan

Isu strategis bidang ini adalah ***Belum meratanya pasokan listrik***. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Jawa Timur masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Sampai tahun 2012 rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 76,88 %. Namun demikian tingkat elektrifikasi perdesaan telah mencapai 99,60 %. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik dan pengembangan sumber energi terbarukan.

Sedangkan meningkatnya pemanfaatan panas bumi dikarenakan mempunyai prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk penyediaan tenaga listrik .

Secara umum penyediaan tenaga listrik dapat diidentifikasi mengenai beberapa aspek antara lain :

1. Kendala

- a. Biaya investasi dan pengelolaan di bidang panas bumi, tinggi.
- b. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pemanfaatan dan pengoperasian energi terbarukan
- c. Budaya hemat energi masih sulit diterapkan.
- d. Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) belum dapat bersaing dengan energi komersial.
- e. Pasar EBT masih terbatas.
- f. Infrastruktur, kemampuan jasa dan industri EBT kurang mendukung.
- g. Belum adanya peraturan perundangan yang memberikan insentif yang cukup untuk pengembangan energi alternatif.
- h. Minat lembaga permodalan masih rendah untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan infrastruktur energi.
- i. Harga jual energi listrik dari Energi Baru terbarukan (panas bumi) masih belum kompetitif.

2. Peluang

- a. Potensi energi terbarukan di Jawa Timur besar, sehingga mempunyai peluang untuk dikembangkan.
- b. Masih banyak masyarakat dan industri masih memerlukan energi listrik.

- c. Peningkatan PAD dari kontribusi pemanfaatan energi.
- d. Meningkatnya pengembangan energi alternatif.
- e. Pengembangan energi alternatif
 - 1) Pengembangan EBT seperti : Biomassa, Biogas, Biofuel dan gas rawa.
 - 2) Pengembangan Desa Mandiri Energi

3. Program Prioritas.

- a. Pengembangan energi alternatif
 - 1) Pengembangan energi baru terbarukan (EBT), seperti mikrohidro, surya, angin, diesel, biomassa.
 - 2) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan EBT
- b. Pengembangan Ketenagalistrikan
 - 1) Pembangunan jaringan distribusi listrik PLN
 - 2) Sosialisasi hemat energi listrik
 - 3) Pengembangan energi alternatif panas bumi

B. Isu Strategis Bidang Pertambangan Umum dan Migas

Isu strategis bidang pertambangan umum adalah Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, bangunan, perumahan dll, sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk raw material. Disamping itu masih juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin.

1. Kendala

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan dan teknik penambangan dalam kegiatan usaha pertambangan.
- b. Citra pertambangan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan diperburuk oleh adanya Penambangan Tanpa Ijin (PETI).
- c. Terbatasnya sarpras dalam promosi investasi usaha pertambangan

2. Peluang

- a. Potensi bahan tambang dan sumber daya manusia sangat besar, sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Program Prioritas.

c. Pengembangan pertambangan

- 1) Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan
- 2) Peningkatan pelayanan perijinan usaha pertambangan
- 3) Pembinaan dan penertiban PETI
- 4) Peningkatan promosi dan kerjasama serta kemitraan usaha pertambangan
- 5) Pengembangan teknologi tepat guna dalam usaha pertambangan
- 6) Penguatan data base sumber daya mineral
- 7) Peningkatan upaya konservasi sumber daya mineral

Isu strategis bidang migas adalah Percepatan peningkatan produksi Minyak Bumi sebesar 1,01 juta BOPD sesuai Inpres No. 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, Percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, Kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan serta Distribusi LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran dan tepat harga.

Dalam hal ketersediaan energi, pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan energi terutama migas. Kebutuhan energi tersebut tidak diimbangi dengan dengan peningkatan penyediaan energi, dikarenakan cadangan energi utamanya energi (bahan bakar) fosil cadangannya semakin kecil yang pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Hal ini merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di Jawa Timur.

Kewenangan daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah bagaimana mengendalikan distribusi BBM agar tepat sasaran untuk mendukung usaha masyarakat utamanya Usaha Kecil dan menengah (UKM) dan pasokan ke fasilitas vital seperti pembangkit listrik. Kelangkaan BBM bersubsidi biasanya dipicu gangguan distribusi, adanya spekulasi dan tingginya permintaan BBM yang berdampak pada gangguan perekonomian dan distribusi barang/jasa.

Namun demikian isu tersebut dapat diidentifikasi mengenai beberapa aspek antara lain :

1. Kendala

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan teknologi dalam pemanfaatan sumber energi alternatif utamanya pengganti bahan bakar
- b. Masih banyaknya penyimpangan – penyimpangan dalam distribusi migas di hilir terutama ke industri dan masyarakat

2. Peluang

- a. Potensi EBT masih sangat besar untuk dikembangkan seperti : Biomassa, Biogas, Biofuel dan gas rawa.
- b. Kebutuhan BBM setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan UMKM.

3. Program Prioritas

- a. Pengembangan Migas
 - 1) Pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan LPG
 - 2) Penyusunan neraca bidang migas.

C. Isu Strategis Bidang Air Tanah

Isu strategis bidang Air Tanah adalah Belum optimalnya implementasi pengelolaan usaha pemanfaatan air tanah sesuai kaidah konservasi demikian juga belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pemetaan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah yang sulit air

Air Tanah merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan industri. Eksploitasi air tanah yang tidak terkendali akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas air tanah, sementara kekeringan/kekurangan air juga hampir terjadi setiap tahun. Oleh karena itu pengelolaan air tanah diharapkan berjalan baik dan seimbang antar eksploitasi dan konservasi.

Namun demikian isu tersebut dapat diidentifikasi mengenai beberapa aspek antara lain :

1. Kendala

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan air tanah.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan air tanah di daerah rawan kering.
- c. Masih banyaknya kegiatan pengambilan air tanah tanpa ijin.

2. Peluang

- a. Potensi air tanah (31 CAT) dan cukup besar.
- b. Meningkatnya penggunaan air tanah dan pengembangan energi alternatif.

3. Program Prioritas.

- a. Pengembangan air tanah
 - 1) Pembangunan sumur bor di daerah sulit air/ rawan kering.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah
 - 3) Peningkatan pelayanan perijinan air tanah
 - 4) Konservasi air tanah

D. Isu Strategis Bidang Geologi

Isu strategis bidang ini adalah Masih banyak wilayah rawan bencana yang belum terpetakan, Secara geografis sebagian wilayah di Jatim rawan terhadap bencana geologi, seperti gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, banjir bandang dan tsunami

Kegiatan penatagunaan lahan dan penyusunan tata ruang wilayah di provinsi Jawa Timur belum memperhatikan kondisi kegeologian dan kemampuan lahan sehingga mamucu dan dapat mengakibatkan terjadinya bencana Geologi. Sehingga dalam pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan kondisi geologi daerahnya;

Diwilayah Jawa Timur terdapat banyak situs geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana ilmu pengetahuan dan pembelajaran sampai saat ini belum dilakukan inventarisasi dan perlindungan, sehingga banyak mengalami kerusakan;

Kawasan yang ditempati batuan karbonat seringkali berkembang dan membentuk bentang alam karst, yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfugsi sebagai pengatur alami tata air yang menyimpan nilai ilmiah, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

Dengan adanya Permen ESDM RI Nomor: 17 tahun 2012 tentang Bentang Alam Karst, dipandang perlu melakukan Inventarisasi terkait pendataan kawasan bentang alam karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst dan perlu dilakukan secara terus menerus dalam pemanfaatannya.

1. Kendala

- a. Bencana alam tidak dapat diramalkan kapan terjadinya.
- b. Pola penanggulangan bencana alam masih bersifat parsial, kurang terpadu dan kurangnya koordinasi antar semua pihak.
- c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam dan kurangnya sarpras dalam penanggulangan bencana alam.

2. Peluang

4. Mengelola risiko bencana alam secara cermat dan tertata untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan, terutama memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil.

3. Program prioritas.

- a. Pengembangan mitigasi bencana alam dan geologi
 - 1) Evaluasi daerah rawan bencana alam dan geologi
 - 2) Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana alam geologi
 - 3) Pengembangan teknologi mitigasi bencana alam geologi
 - 4) Pengembangan geologi tata lingkungan
- b. Peningkatan Informasi kegeologian untuk pemanfaatan wilayah maupun untuk mengurangi resiko bencana geologi.

E. Isu Strategis Sekretariat

Isu strtegis dalam sekretariat adalah ***kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.***

Untuk itu isu tersebut dapat diidentifikasi dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kendala
 - a. Keterbatasan SDM, baik kuantitas maupun kualitas.
 - b. Sarana prasarana penunjang sebagian besar sudah tua, baik komputer maupun sarana mobilitas.
 - c. Lokasi kantor yang tidak mendukung, sering terjadi banjir apabila hujan lebat yang belum bisa di tanggulangi.

2. Peluang
 - a. Tupoksi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur mempunyai peranan penting dalam pengusahaan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain Energi, Air Tanah, Mineral/Bahan Tambang dan penanganan bencana.
 - b. Mempunyai satu kantor Dinas di pusat pemerintahan dan empat Balai ESDM di wilayah pengembangan, sehingga pelayanan dapat menjangkau keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur.
 - c. Mempunyai laboratorium dan bengkel geologi yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Program Prioritas
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah (Asuransi Aset)
 - 4) Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - 10)Kegiatan Penyediaan Makan Minum
 - 11)Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
 - 12)Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran

 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Alat Laboratorium
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Arsip
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel
 - 8) Kegiatan Sarana Prasarana Kantor

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Pengadaan Pakaian Olah Raga.

- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Bidang ESDM
 - 3) Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

I. Visi dan Misi SKPD

1. Pernyataan Visi

Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2015 - 2019, yaitu:

“ Pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur “

Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagai berikut :

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral mengandung arti bahwa Energi dan Sumber Daya Mineral harus dikelola berdasarkan asas manfaat, efisien, dan berkelanjutan yaitu suatu proses yang terencana dan terarah dalam merumuskan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi manfaat, masyarakat dan daya tarik investasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan antara usaha pertambangan dengan kepentingan masyarakat dan mendapatkan jaminan ketersediaan energi sehingga dapat menunjang proses pembangunan di seluruh sektor, tercapainya akses terhadap energi bagi masyarakat yang tidak mampu dan terisolir, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berwawasan lingkungan mengandung arti bahwa didalam pengelolaan pertambangan harus mengikuti prinsip konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan. Dalam pengelolaan energi juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi penggunaan energi, penghematan energi, pengurangan dan pencegahan emisi dan pemanfaatan energi secara optimal. Dalam skala global salah satu dampak pemanfaatan energi (fosil) yang berlebihan adalah terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim serta kenaikan permukaan air laut. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya

yang perlu dilakukan adalah mengurangi pemakaian energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.

1. Pernyataan Misi

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur merupakan rumusan secara garis besar mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- 1) **Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan.**
- 2) **Mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis sumberdaya energi baru terbarukan.**
- 3) **Mengembangkan data potensi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang dan meningkatkan kegiatan pertambangan rakyat.**
- 4) **Mewujudkan pengelolaan Minyak dan gas bumi yang optimal dalam mendukung kebutuhan nasional.**
- 5) **Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air di Jawa Timur.**
- 6) **Meningkatkan penyediaan database sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.**
- 7) **Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik sektor energi dan sumber daya mineral.**

II. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dari sektor energi dan sumber daya mineral yang dihadapi.

Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019, yaitu ;

1. Menyediakan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan
2. Menyediakan pasokan energi pedesaan dari penganeekaragaman sumberdaya energi baru terbarukan dengan melakukan konservasi energi.
3. Terpenuhinya kebutuhan pemakai komoditas tambang yang ada di Jawa Timur.
4. Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi bagi masyarakat Jawa Timur
5. Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berwawasan keseimbangan lingkungan.
6. Terwujudnya peningkatan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
7. Penguatan kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di sektor energi dan sumberdaya mineral.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan energi dan sumber daya mineral di daerah Provinsi Jawa Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran untuk mencapai tujuan, misi dan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019, yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan data & informasi sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi;
2. Meningkatkan pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi
3. Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan airtanah
4. Meningkatkan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air.
5. Mengurangi komoditas tambang yang diambil dari luar Jawa Timur bagi pelaku industri pemakai komoditas tambang.
6. Meningkatkan PDRB sektor pertambangan
7. Tercapainya target produksi minyak bumi sebesar 150.000 BOPD

- 8. Terpenuhinya pasokan gas untuk industri di Jawa Timur**
- 9. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi penduduk daerah pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan**
- 10. Meningkatnya elektrifikasi rumah tangga tidak mampu**
- 11. Terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik untuk kegiatan industri.**
- 12. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan serta pemanfaatan energi baru terbarukan**
- 13. Meningkatnya pemanfaatan energi panas bumi baik langsung maupun tidak langsung**
- 14. Meningkatkan Tata kelola administrasi pembangunan energi dan sumberdaya mineral.**

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan energi dan sumber daya mineral jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, sebagai berikut :

Tabel 2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 1 : Mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis sumber daya energi baru terbarukan			
Menyediakan pasokan energi pedesaan dari penganekaragaman sumberdaya energi baru terbarukan dengan melakukan konservasi energi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan serta pemanfaatan energi baru terbarukan • Meningkatnya pemanfaatan energi panas bumi baik langsung maupun tidak langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi potensi energi terbarukan • Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan • Pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi • Pembinaan pengawasan dan pengelolaan energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan sebagai sumber energi masyarakat dan pembangkit listrik • Meningkatkan dan mendorong investasi sebagai upatya pengembangan energi panas bumi
MISI 2 : Mewujudkan dan menjaga ketersediaan paskan listrik yang aman dan ramah lingkungan			
Menyediakan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi penduduk daerah pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan • Meningkatnya elektrifikasi rumah tangga tidak mampu • Terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik untuk kegiatan industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan, kepulauan yang belum terjangkau layanan listrik • Pengembangan pembangkit listrik tersebar untuk wilayah-wilayah pedesaan terpencil, kepulauan. • Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ketenagalistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas • Meningkatkan pelayanan listrik pada rumah tangga kurang mampu • Meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik
MISI 3 : Mengembangkan data potensi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang , dan meningkatkan kegiatan pertambangan rakyat			
Terpenuhinya kebutuhan industri pemakai komoditas tambang yang ada di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kebutuhan komoditas tambang yang diambil dari luar Jawa Timur / Luar Negeri (impor) bagi pelaku industri pemakai komoditas tambang • Meningkatkan PDRB sektor pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menarik investor dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Tambang 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan perizinan sektor pertambangan dan dukungan infrastruktur serta menjamin ketersediaan energi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 4 : Terwujudnya pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang optimal dalam mendukung kebutuhan Nasional			
Terpenuhinya kebutuhan BBM dan Gas Bumi bagi masyarakat Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya target produksi minyak bumi sebesar 250 BOPD • Terpenuhinya pasokan gas untuk kebutuhan industri di Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi KKKS • Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, SKK Migas dan KKKS • Menarik minat investor untuk berinvestasi di Jawa Timur karena adanya jaminan pasokan gas • Mendukung infrastruktur distribusi gas di Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitasi dan dukungan berupa kemudahan rekomendasi dan perizinan
MISI 5 : Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di Jawa Timur			
Terwujudnya pengelolaan air tanah yang ber wawasan keseimbangan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi • Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah. • Meningkatkan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah. • Melakukan Penelitian zona konservasi dan pemanfaatan air tanah • Melakukan penelitian dan penataan fungsi lahan untuk mempertahankan siklus hidrologi dengan baik • Melakukan penyelidikan, eksplorasi dan eksploitasi air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan pemanfaatan air tanah • Meningkatkan kajian lingkungan guna eksistensi air tanah tetap terjaga • Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah , eksplorasi dan pembangunan sumur bor air tanah
MISI 6 : Meningkatkan Penyediaan database sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi			
Terwujudnya peningkatan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyediaan data & informasi sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian sumberdaya geologi, geologi lingkungan. • Melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana geologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan informasi sumberdaya geologi & pemanfaatan Sumberdaya geologi serta pemetaan Geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 7 : Mewujudkan Percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik sektor ESDM			
Penguatan Kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sektor energi dan sumber daya mineral	Meningkatkan tatakelola administrasi pembangunan energi dan sumber daya mineral	Pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien • Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, asset dan kepegawaian serta administrasi umum • Meningkatkan daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM • Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian dan kajian data dan informasi ESDM • Meningkatkan monitoring dan evaluasi kajian dan pembangunan infrastruktur sektor ESDM

III. Strategi dan kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan energi dan sumber daya mineral daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembangunan energi dan sumber daya mineral daerah Jawa Timur dirumuskan untuk mencapai dibidang pengembangan;

1. Kegeologian yaitu meningkatkan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian sumberdaya geologi, Geologi lingkungan dan Mitigasi bencana alam geologi serta air tanah;
2. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan pada diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTB), untuk mencapai beberapa hal yakni:

Rencana pelaksanaan peningkatan ketahanan dan kemandirian energi terdiri dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang.

Jangka pendek;

- 1) Mendorong pengembangan Desa Mandiri Energi dengan pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada di daerah;
- 2) Mendorong pelaksanaan konservasi energi dan diversifikasi energi.

Jangka menengah;

- 1) Survey potensi energi baru dan terbarukan;
- 2) Identifikasi kebutuhan energi yang paling mendesak untuk masyarakat desa;
- 3) Sosialisasi penghematan energi dan air.

Jangka panjang;

- 1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga gelombang laut.
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan diarahkan agar :

- Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral;
 - Meningkatkan kontribusi iuran sektor pertambangan dan PDRB;
 - Meningkatkan nilai tambah hasil tambang;
 - Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
4. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar kebutuhan terhadap minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran.

Strategi pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral di daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di wilayah Jatim yang aman, dan ramah lingkungan;
- b. Melakukan diversifikasi dan konservasi energi serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Badan Usaha di sektor migas dalam rangka pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta melakukan proyeksi kebutuhan BBM bersubsidi;
- d. Melakukan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan;
- f. Melakukan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik, eksplorasi air tanah dengan pemboran dan pembangunan sarana prasarana penampungan air bersih di daerah sulit air;

- g. Meningkatkan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian potensi geologi , sumber daya mineral, pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi;
- h. Pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan usaha tenaga listrik;
- b. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konservasi energi;
- d. Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah terpencil dan kepulauan;
- e. Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
- f. Memberikan perlindungan lingkungan dan memperhatikan konservasi sumberdaya mineral;
- g. Melakukan pengaturan dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM dan LPG 3 Kg;
- h. Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah, eksplorasi air tanah dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana penampungan air bersih dari air tanah di daerah sulit air;
- i. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi geologi & pemanfaatan Sumberdaya geologi serta pemetaan Geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi;
- j. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien;

- k. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi Keuangan, Asset dan Kepegawaian serta administrasi umum;
- l. Meningkatkan daya dukung Pengelolaan data dan informasi sektor ESDM;
- m. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian dan kajian data dan informasi ESDM.

Adapun keterkaitan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2019 digambarkan pada Tabel 3

Tabel 3
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 1 : Meningkatkan Penyediaan Database Sumberdaya Geologi, Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi			
1. Terwujudnya peningkatan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyediaan data & informasi sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian sumberdaya geologi, geologi lingkungan. • Melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana geologi. 	Meningkatkan ketersediaan informasi sumberdaya geologi & pemanfaatan Sumberdaya geologi serta pemetaan Geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.
MISI 2 : Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air di Jawa Timur			
2. Terwujudnya penge-lolaan air tanah yang berwawasan keseimbangan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan pemanfaatan air tanah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penelitian zona konservasi dan pemanfaatan air tanah 	
	<ul style="list-style-type: none"> Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penelitian dan penataan fungsi lahan untuk mempertahankan siklus hidrologi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kajian lingkungan guna eksistensi air tanah tetap terjaga
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyelidikan, eksplorasi dan eksploitasi air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah, eksplorasi dan pembangunan sumur bor air tanah
MISI 3 : Mengembangkan data potensi sumber daya mineral untuk meningkatkan Nilai Tambah komoditas tambang, dan meningkatkan kegiatan pertambangan rakyat			
3. Terpenuhinya kebutuhan industri pemakai komoditas tambang yang ada di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kebutuhan komoditas tambang yang diambil dari luar Jawa Timur / Luar Negeri (impor) bagi pelaku industri pemakai komoditas tambang 	<ul style="list-style-type: none"> Menarik investor dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Tambang 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kemudahan perizinan sektor pertambangan dan dukungan infrastruktur serta menjamin ketersediaan energi
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI), melakukan reklamasi terhadap lahan yang rusak serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan perlindungan lingkungan dan memperhatikan konservasi sumberdaya mineral.
MISI 4 : Terwujudnya pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang optimal dalam mendukung kebutuhan Nasional			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
4. Terpenuhinya kebutuhan BBM dan Gas Bumi bagi masyarakat Jawa Timur	Tercapainya target produksi minyak bumi Terpenuhinya pasokan gas untuk kebutuhan industri di Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi KKKS • Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, SKK Migas dan KKKS • Menarik minat investor untuk berinvestasi di Jawa Timur karena adanya jaminan pasokan gas • Mendukung infrastruktur distribusi gas di Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan fasilitas dan dukungan berupa kemudahan rekomendasi dan perizinan
MISI 5 : Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan			
5. Menyediakan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi penduduk daerah pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan • Meningkatnya elektrifikasi rumah tangga tidak mampu • Terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik untuk kegiatan industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan, kepulauan yang belum terjangkau layanan listrik • Pengembangan pembangkit listrik tersebar untuk wilayah-wilayah pedesaan terpencil, kepulauan. • Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ketenagalistrikan 	<p>Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas</p> <p>Meningkatkan pelayanan listrik pada rumah tangga kurang mampu</p> <p>Meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik</p>
MISI 6 : Mengembangkan diversifikasi energi pedesaan berbasis sumber daya energi baru terbarukan			
6. Menyediakan pasokan energi pedesaan dari	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan serta pemanfaatan energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi potensi energi terbarukan • Pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
sumberdaya energi baru terbarukan dengan melakukan konservasi energi	baru terbarukan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemanfaatan energi panas bumi baik langsung maupun tidak langsung 	pemanfaatan energi terbarukan <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi • Pembinaan pengawasan dan pengelolaan energi 	terbarukan sebagai sumber energi masyarakat dan pembangkit listrik <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan mendorong investasi sebagai upaya pengembangan energi panas bumi
MISI 7 : Mewujudkan Percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik sektor ESDM			
6. Penguatan Kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sektor energi dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tatakelola administrasi pembangunan energi dan sumber daya mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien • Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, asset dan kepegawaian serta administrasi umum • Meningkatkan daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM • Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian dan kajian data dan informasi ESDM • Meningkatkan monitoring dan evaluasi kajian dan pembangunan infrastruktur sektor ESDM

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan energi dan sumber daya mineral di daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur menetapkan Program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Adapun Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi di lingkungan dinas

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana untuk peningkatan sumber daya aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, kinerja yang ingin dicapai adalah peningkatan pelayanan SKPD dan terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu.

4. PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan, kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksananya program dan kegiatan dinas sesuai tugas pokok dan fungsi serta terwujudnya kerjasama program dan kegiatan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN.

Program Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Energi dan ketenagalistrikan, kinerja yang akan dicapai adalah terpenuhinya pasokan

listrik dalam jumlah cukup, aman dan ramah lingkungan untuk sektor masyarakat, pemerintah dan industri, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan konservasi energi dan mengurangi dampak emisi Gas Rumah Kaca serta meningkatkan rasio desa berlistrik.

6. PROGRAM INVENTARISASI, PEMANFAATAN DAN KONSERVASI SERTA PENGAWASAN PERTAMBANGAN UMUM DAN MIGAS

Program Inventarisasi, pemanfaatan dan konservasi serta pengawasan Pertambangan umum dan Migas, kinerja yang ingin dicapai meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral serta pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan teknik pertambangan yang baik dan benar. pengaturan, pengawasan pendistribusian dan penyediaan bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran.

7. PROGRAM PEGELOLAAN AIR TANAH

Program Pengelolaan air tanah, kinerja yang ingin dicapai yaitu meningkatkan penelitian potensi dan pemanfaatan sumberdaya air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.

8. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI

Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kinerja yang ingin dicapai yaitu meningkatkan penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi, pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.

**TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN & INDIKATIF PENDANAAN**

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Kondisi 2013	Target Kinerja, lokasi dan pagu indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan pemanfaatan air tanah yang berorientasi kepada aspek konservasi	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH								
	<i>Kegiatan 1 : Penyediaan database dan informasi pengelolaan air tanah</i>	<i>1. Meningkatnya data kajian, penelitian pengelolaan air tanah</i>							
	1. Penyusunan Data Teknis Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah dokumen laporan Penyusunan	1 Dok	2 Dok 2 kec Rp. 100 jt	2 Dok 2 kec Rp. 100 jt	2 Dok 2 kec Rp. 100 jt	2 Dok 2 kec Rp. 100 jt	2 Dok 2 kec Rp. 100 jt	2 Dok 2 kec Rp. 100 jt
	2. Penelitian Zona Konservasi dan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah dokumen laporan penelitian	2 Dok	2 Kab Rp. 600 Jt	2 Kab Rp. 600 Jt	2 Kab Rp. 600 Jt	2 Kab Rp. 600 Jt	2 Kab Rp. 600 Jt	2 Kab Rp. 600 Jt
	3. Pemantauan Lokasi Permohonan Rekomendasi Teknis Air Tanah	Jumlah lokasi permohonan	100 lokasi	Kab/kot 100 lokasi Rp. 147 jt	Kab/kot 100 lokasi Rp. 147 jt	Kab/kot 100 lokasi Rp. 147 jt	Kab/kot 100 lokasi Rp. 147 jt	Kab/kot 100 lokasi Rp. 147 jt	Kab/kot 100 lokasi Rp. 147 jt
	4. Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Jumlah Peserta	2x75 org Rp. 85 jt	Kab/kota se Jatim Rp. 100 jt	Kab/kota se Jatim Rp. 100 jt	Kab/kota se Jatim Rp. 100 jt	Kab/kota se Jatim Rp. 100 jt	Kab/kota se Jatim Rp. 100 jt	Kab/kota se Jatim Rp. 100 jt
	5. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rekomendasi Teknik Air Tanah	Jumlah rekomtek	700 rekomtek	Kab/kota 750 rek Rp. 183 jt	Kab/kota 750 rek Rp. 200 jt	Kab/kota 800 rek Rp. 200 jt	Kab/kota 800 rek Rp. 200 jt	Kab/kota 850 rek Rp. 200 jt	Kab/kota 850 rek Rp. 200 jt
	6. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan air Tanah	Jumlah dokumen	-	-	1 dok Rp. 50 jt	-	-	-	-
7. Penyusunan Kajian Dampak Pemanfaatan Pengambilan Air Tanah	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Kec. Singosari, Punging	2 Dok Kec. Rp. 100 Jt	2 Dok Kec. Rp. 100 Jt	2 Dok Kec. Rp. 100 Jt	2 Dok Kec. Rp. 100 Jt	2 Dok Kec. Rp. 100 Jt	2 Dok Kec. Rp. 100 Jt	

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Kondisi 2013	Target Kinerja, lokasi dan pagu indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
Menjaga daerah resapan sebagai daerah imbuhan	Kegiatan 2 : Peningkatan kegiatan dan kajian konservasi air tanah	2. Terpeliharanya kondisi air tanah di daerah resapan							
	1. Pembuatan Sumur Resapan Air Tanah	Jumlah sumur resapan	20 unit	-	-	20 unit Rp. 200 jt	20 unit Rp. 200 jt	20 unit Rp. 200 jt	20 unit Rp. 200 jt
	2. Pemeliharaan Sumur Pantau	Jumlah sumur pantau yang dimanfaatkan	6 unit	-	-	Rp 50 jt	Rp. 50 jt	Rp. 50 jt	Rp. 50 jt
	3. Kajian Lokasi Sumur Resapan Di Daerah imbuhan	Jumlah Doku men kajian daerah resapan	1 Dok	1 Dok. Kab/Kota Rp. 100 jt	1 Dok. Kab/Kota Rp. 100 jt	1 Dok. Kab/Kota Rp. 100 jt	1 Dok. Kab/Kota Rp. 100 jt	1 Dok. Kab/Kota Rp. 100 jt	1 Dok. Kab/Kota Rp. 100 jt
	4. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah	Jumlah sumur bor yang dimanfaatkan sesuai peraturan yang berlaku	150 sumur	150 sumur Rp. 150 jt	150 sumur Rp. 150 jt	150 sumur Rp. 150 jt	150 sumur Rp. 150 jt	150 sumur Rp. 150 jt	150 sumur Rp. 150 jt
Meningkatkan penyediaan air bersih bagi daerah sulit air	Kegiatan 3 : Pengembangan Pengelolaan Air Tanah	3. Meningkatnya pemanfaatan air tanah di daerah sulit air							
	1. Penyelidikan Eksplorasi Air Tanah dengan Metode Geolistrik	Jumlah dokumen laporan	3 Dok	2 Dok 2 kec. Rp. 200 jt	2 Dok 2 kec. Rp. 200 jt	2 Dok 2 kec. Rp. 200 jt	2 Dok 2 kec. Rp. 200 jt	2 Dok 2 kec. Rp. 200 jt	2 Dok 2 kec. Rp. 200 jt
	2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Untuk Penyediaan Air Bersih	Jumlah Sumur Bor	7 Unit	5 Unit/ 5 Kab. Rp. 1.500 Jt	5 Unit/ 5 Kab. Rp. 1.500 Jt	5 Unit/ 5 Kab. Rp. 1.500 Jt	5 Unit/ 5 Kab. Rp. 1.500 Jt	5 Unit/ 5 Kab. Rp. 1.500 Jt	5 Unit/ 5 Kab. Rp. 1.500 Jt
	3. Penyusunan Kajian Potensi Air Tanah Daerah Sulit Air	Jumlah Dokumen Laporan	-	-	1 Dok Kab/kota Rp. 100 jt	1 Dok Kab/kota Rp. 100 jt	1 Dok Kab/kota Rp. 100 jt	1 Dok Kab/kota Rp. 100 jt	1 Dok Kab/kota Rp. 100 jt

**TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN & INDIKATIF PENDANAAN**

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan)	Kondisi 2013	Target Kinerja, lokasi dan pagu indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan, serta pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, bagi penduduk pedesaan daerah terpencil dan kepulauan.	PROGRAM INVENTARISASI, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN								
	<i>Kegiatan 1: Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dan Ketenagalistrikan</i>	<i>1. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi masyarakat dan pembangkit listrik.</i>							
	a. Pembangunan PLTMH	Rumah Tangga Pemakai Listrik PLTMH (KK)	80 KK	100 KK Rp. 1,85 M	400 KK Rp. 4,5 M	200 KK Rp. 2,6 M	250 KK Rp. 2,7 M	250 KK Rp. 2,8 M	300 KK Rp. 3,0 M
	b. Pembangunan PLTS	Rumah Tangga Pemakai PLTS (KK)	32 KK	-	100 KK Rp. 1,0 M	100 KK Rp. 1,0 M	100 KK Rp. 1,0 M	100 KK Rp. 1,0 M	100 KK Rp. 1,0 M
	c. Pembangunan PLT Bayu	Rumah Tangga Pemakai Listrik PLTB (KK)	-	-	-	-	-	-	100 KK Rp. 2,0 M
	d. Pembangunan Biogas/ Material Biogas	Rumah Tangga Pemakai Listrik Biogas (KK)	-	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta
e. Hibah Instalasi Rumah	Rumah Tangga Pemakai Listrik Non PLN(KK)	-	400 KK Rp. 1,0 M	400 KK Rp. 1,0 M	400 KK Rp. 1,0 M	400 KK Rp. 1,0 M	400 KK Rp. 1,0 M	400 KK Rp. 1,0 M	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan)	Kondisi 2013	Target Kinerja, lokasi dan pagu indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan baik secara langsung maupun tidak langsung.	Kegiatan 2 : <i>Inventarisasi Sumber daya energi terbarukan dan Ketenagalistrikan</i>	2. Meningkatkan dan mendorong investasi sebagai upaya pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan.							
	a. Survey Dusun / Desa belum berlistrik.	Data Desa Belum berlistrik	4 Dokumen	-	1 Dokumen Rp.100 Jt	1 Dokumen Rp. 100 Jt	1 Dokumen Rp. 100 Jt	1 Dokumen Rp. 100 Jt	1 Dokumen Rp. 100 Jt
	b. Survey potensi energi terbarukan.	Data potensi energi terbarukan	-	2 Dokumen Rp. 900 Jt	2 Dokumen Rp. 900 Jt	2 Dokumen Rp. 500 Jt	2 Dokumen Rp. 500 Jt	2 Dokumen Rp. 500 Jt	2 Dokumen Rp. 500 Jt
	c. Updating database energi dan Ketenagalistrikan	Data terbaru energi dan ketenagalistrikan	1 Dokumen	1 Dokumen Rp. 150 Jt	1 Dokumen Rp. 50 Jt	1 Dokumen Rp. 50 Jt	1 Dokumen Rp. 50 Jt	1 Dokumen Rp. 50 Jt	1 Dokumen Rp. 50 Jt
	d. Studi Kelayakan dan penyusunan DED.	Data Teknis dan pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt
	e. Diversifikasi pemanfaatan energi terbarukan.	Data potensi energi terbarukan	-	-	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt	2 Dokumen Rp. 200 Jt
	Kegiatan 3 : <i>Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Bidang Energi dan Ketenagalistrikan</i>	3. Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap pembangunan sektor ESDM							
	a. Pembinaan Aparatur masyarakat.	Pemahaman masyarakat terhadap sektor ESDM	180 Orang	120 Orang Rp. 150 Jt	200 Orang Rp. 225 Jt	200 Orang Rp. 225 Jt	200 Orang Rp. 225 Jt	200 Orang Rp. 250 Jt	200 Orang Rp. 250 Jt
	b. Kompetensi hemat energi.	Pemahaman masyarakat terhadap sektor ESDM	-	-	1 Paket Rp. 100 Jt	1 Paket Rp. 100 Jt	2 Paket Rp. 200 Jt	2 Paket Rp. 200 Jt	2 Paket Rp. 200 Jt

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Program / Kegiatan)	Kondisi 2013	Target Kinerja, lokasi dan pagu indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Kegiatan 4 : Pengawasan dan Pengendalian Bidang Energi dan Ketenaga listrikan.</i>	<i>4. Pemanfaatan energi yang efisien dan tepat sasaran</i>							
	a. Pengawasan dan Pemanfaatan dan pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan.	Data penggunaan energi/kelistrikan	-	8 Kali Rp. 200 Jt	8 Kali Rp. 200 Jt	8 Kali Rp.200 Jt	8 Kali Rp. 200 Jt	8 Kali Rp. 225 Jt	8 Kali Rp. 225 Jt
	b. Monev implementasi penghematan energi.	Dokumen penghematan energi	-	-	2 Dok. Rp. 100 Jt	2 Dok. Rp. 100 Jt	2 Dok. Rp. 100 Jt	2 Dok. Rp. 100 Jt	2 Dok. Rp. 100 Jt
	c. Audit energi.	Data penggunaan energi	-	-	2 Dok. Rp. 150 Jt	2 Dok. Rp. 150 Jt	2 Dok. Rp. 150 Jt	2 Dok. Rp. 200 Jt	2 Dok. Rp. 200 Jt
Meningkatnya Elektrifikasi rumah tangga di daerah pedesaan	Penyusunan data kebutuhan listrik di Jawa Timur	Rasio Elektrifikasi	74,3	77,5	80,9	84,3	87,8	91,5	95,7
		Rasio Rumah tangga Berlistrik	99,58	99,59	99,60	99,61	99,62	99,63	99,64

**TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATIF PENDANAAN**

SASARAN	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan)	Kondisi Tahun 2013	Target Kinerja, Lokasi dan Pagu Indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan Mitigasi bencana geologi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI								
	<i>Kegiatan 1 : Penyusunan data base sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi</i>	<i>1. Meningkatkan penelitian, Inventarisasi Dan Pengembangan Potensi Sumberdaya Geologi, Pemetaan Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi</i>							
	1. Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Karst dan Kawasan Lindung Geologi di Jawa Timur;	Data Perkembangan kawasan karst	1 Dok	-	1 Dok 3 Kab. Rp. 300 jt	1 Dok 4 Kab. Rp. 400 jt	1 Dok 3 Kab. : Rp. 300 jt	1 Dok 2 Kab. Rp. 250 jt	1 Dok 1 Kab. Rp. 150 jt
	2. Inventarisasi Potensi Geowisata dan Kawasan Lindung Geologi di Jatim	Data potensi geowisata di Jatim	1 Dok	-	1 Dok Kab. : Bangkalan - Sampang Rp. 200 jt	1 Dok Kab. : Bondowoso- Situbondo Rp. 250 jt	1 Dok Kab. Jombang- Kab. Kediri Rp. 250 jt	1 Dok Kab. : Ponorogo- Madiun Rp. 200 jt	-
	3. Sosialisasi Pengembangan Kawasan Karst dan Kawasan Lindung Geologi di Jatim;	Peserta sosialisasi pengembangan kawasan karst	1 Paket	1 Paket Workshop Kawasan Karst Rp. 84 jt	1 Paket Bakorwil PP Madiun Rp. 100 jt	1 Paket Bakorwil PP Malang Rp. 100 jt	1 Paket Bakorwil PP Bojonegoro Rp. 100 jt	1 Paket Bakorwil PP Pamekasan Rp. 100 jt	-
	4. Pengembangan landscape Geopark Wonogiri di Pacitan	Data wilayah karst di jatim		-	1 Paket Kab. Pacitan Rp. 450 jt	-	-	-	-
5.Updating Sistem Informasi Geologi	Data Geologi Jawa Timur		-	1 Dok Jawa Timur Rp. 50 jt	1 Dok Jawa Timur Rp. 50 jt	1 Dok Jawa Timur Rp. 50 jt	1 Dok Jawa Timur Rp. 50 jt	1 Dok Jawa Timur Rp. 50 jt	

SASARAN	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan)	Kondisi Tahun 2013	Target Kinerja, Lokasi dan Pagu Indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	6. Penelitian Resiko Bencana Gerakan Tanah di Jatim;	Data Daerah rawan bencana	-	1 Dok Kab. B. wangi Rp. 200 jt	1 Dok Kab. Jember Rp. 200 jt	1 Dok Kab. T. agung Rp. 200 jt	1 Dok Kab. T. galek Rp. 200 jt	1 Dok Kab. Malang Rp. 200 jt	1 Dok Kab. Blitar Rp. 350 jt
	7. Survei Geologi dan Geokimia Panas Bumi di Jawa Timur;	Dokumen	2 Dok	-	1 Dok Kab. Tuban Rp. 250 jt	1 Dok Kab. Blitar Kab. Kediri Rp. 500 jt			
	Kegiatan 2 : Sosialisasi dan Mitigasi Bencana Geologi	2. Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap potensi geologi teknik, geologi tata lingkungan dan potensi bencana geologi							
	8. Sosialisasi Mitigasi Bencana Tanah Longsor, Tsunami dan Gempa Bumi di Kecamatan-Kecamatan di Jawa Timur	Peserta Sosialisasi Mitigasi bencana	75 Orang	1 Paket di Jawa Timur Rp. 74 jt	3 Paket 3 Kab. 3 Kec. Rp. 300 jt	3 Paket 3 Kab. 6 Kec. Rp. 300 jt	3 Paket 3 Kab. 6 Kec. Rp. 300 jt	3 Paket 3 Kab. 6 Kec. Rp. 300 jt	3 Paket 3 Kab. 6 Kec. Rp. 300 jt
	9. Penelitian Medical Geologi pada Kawasan Gunung Api	Dokumen	1 Dok	-	1 Dok Gunung Kelud Rp. 500 jt	1 Dok Gunung Arjuno Wilerang Rp. 500 jt	1 Dok Gunung Ijen Rp. 500 jt	1 Dok Gn. Raung Rp. 500 jt	1 Dok Gn Bromo Rp. 500 jt
	10. Sosialisasi Geologi Tata Lingkungan di Jawa Timur	Orang	75 Orang	75 Orang Di Jatim Rp. 74 jt	75 Orang Di Jatim Rp. 100 jt	75 Orang Di Jatim Rp. 100 jt	75 Orang Di Jatim Rp. 100 jt	75 Orang Di Jatim Rp. 100 jt	75 Orang Di Jatim Rp. 100 jt

SASARAN	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan)	Kondisi Tahun 2013	Target Kinerja, Lokasi dan Pagu Indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Kegiatan 3 :</i> <i>Peningkatan Informasi Dini pada daerah rawan bencana dan pengembangan wilayah</i>	<i>3. Meningkatkan Informasi geologi untuk masyarakat di daerah rawan bencana dan pengembangan wilayah</i>							
	11. Pengadaan dan Pemasangan Alat Deteksi Longsor di Jawa Timur;	Paket	18 Paket	3 Paket 2 Kab. : Rp. 300 Jt	5 Paket 4 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 4 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 4 Kab. : Rp. 500 jt	5 Unit 3 Kab. : Rp. 500 jt
	12. Pembuatan dan Pemasangan Papan Rambu Bahaya Longsor / Gerakan Tanah di Jatim	Paket	18 Paket	-	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt
	13. Inventarisasi Pengembangan Geologi Lingkungan Dalam Rencana RT RW Kab/ Kota di Jawa Timur;	Dokumen	1 Dok	1 Dok Kab. : Rp. 50 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 200 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 200 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 200 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 200 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 200 jt
	14. Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pesisir di Jawa Timur;	Dokumen	1 Dok	-	1 Dok 2 Kab. : Rp. 500 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 500 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 500 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 500 jt	1 Dok 2 Kab. : Rp. 500 jt
	15. Penyelidikan Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jenis Sanitari Landfill di Jawa Timur;	Dokumen		-	1 Dok 1 Kab. Jember Rp. 300 jt	1 Dok Kab. : Pasuruan Rp. 300 jt	1 Dok Kab. Kediri Rp. 300 jt	1 Dok Kab. Tuban Rp. 300 jt	1 Dok Kab. : Banyuwangi Rp. 300 jt

**TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN & INDIKATIF PENDANAAN**

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Kondisi 2013	Target Kinerja, lokasi dan pagu indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya pengelolaan pertambangan secara optimal untuk peningkatan nilai tambah komoditas tambang.	PROGRAM INVENTARISASI, PEMANFAATAN DAN KONSERVASI SERTA PENGAWASAN PERTAMBANGAN UMUM DAN MIGAS								
	<i>Kegiatan 1 : Inventarisasi, Penyusunan Neraca, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Migas</i>	1. Meningkatkan Data-Data Potensi Sumber Daya Mineral Dan Migas							
	a. Kegiatan Kajian Peningkatan Nilai Tambah Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan di Jatim	Teknologi Tepat Guna Untuk Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Tambang	-	-	Piripilit Zeolit Jawa Timur 500 jt	Feldspar Bentonit Jawa Timur 500 jt	Phosphate Dolomit Jawa Timur 500 jt	Psir Kuarsa Clay Jawa Timur 500 jt	Trass Sulfur Jawa Timur 500 Jt
	d. Kegiatan Kajian Potensi Dan Daya Dukung Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan	Kelayakan Kegiatan Pertambangan Dari Daya Dukung Lingkungan	-	-	2 Kab. Rp. 700 Jt.	2 Kab. Rp. 700 Jt.	2 Kab. Rp. 700 Jt.	2 Kab. Rp. 700 Jt.	2 Kab. Rp. 700 Jt.
c. Hibah Peralatan Tambang Kepada Penambang Skala Kecil	Pembinaan dan peningkatan produksi serta pendapatan/perekonomian penambang skala kecil	8 kabupaten (Kediri, Blitar, Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek)	Kab. Malang Jember, S.bondo, B. woso, B. wangi, Lumajang, Pasuruan	150 jt 5 Kab.	150 jt 5 Kab.	150 jt 5 Kab.	150 jt 5 Kab.	150 jt 5 Kab.	

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Kondisi 2013	Target Kinerja, lokasi dan pagu indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	d. Penertiban Kegiatan PETI (Pertambangan tanpa izin)	Berkurangnya Jumlah Kegiatan PETI	Penertiban PETI Se-Jawa Timur	10 Kab/Kota Rp. 50jt	10 Kab/Kota Rp. 50jt	10 Kab/Kota Rp. 50jt	10 Kab/Kota Rp. 50jt	10 Kab/Kota Rp. 50jt	10 Kab/Kota Rp. 50jt
	e. Reklamasi Area Bekas Tambang Rakyat	Luas areal bekas tambang terganggu berkurang	6 Ha 3.Kab/Kota Rp. 300 jt	6 Ha 3 Kab/Kota Rp. 300 jt	6 Ha 3 Kab/Kota Rp. 300jt	6 Ha 3 Kab/Kota Rp. 300jt	8Ha 4 Kab/Kota Rp.400jt	8.Ha 4 Kab/Kota Rp. 400jt	8 Ha 4 Kab/Kota Rp. 400jt
	f. Operasional dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium	Kompetensi laboratorium sesuai dengan ISO/IEC 17025:2005	-	750 Juta	350 Juta	350 Juta	450 Juta	450 Juta	450 Juta
Peningkatan Pengelolaan Migas Untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat	Kegiatan 2 : Pengelolaan, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Mineral dan Migas	Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah Sumber daya mineral dan migas serta program hibah kepada masyarakat							
	a. Kegiatan Kajian Inventarisasi Sumur Tua Migas di Jawa Timur	Inventarisasi jumlah sumur tua di Jawa Timur	-	-	200 Juta 2 Kab.	Rp. 200 Jt 2 Kab.	200 Juta 2 Kab.	200 Juta 2 Kab.	200 Juta 2 Kab.
	b. Fasilitasi dan Dukungan Kegiatan Pengelolaan Migas Hulu	Sosialisasi dan sinkronisasi program kegiatan eksplorasi dan eksploitasi midas hulu		Sosialisasi 100 Jt Rakor dan sinkronisasi dgn KKKS di Jatim 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt Rakor dan sinkronisasi dgn KKKS di Jatim 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt Rakor dan sinkronisasi dgn KKKS di Jatim 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt Rakor dan sinkronisasi dgn KKKS di Jatim 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt Rakor dan sinkronisasi dgn KKKS di Jatim 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt Rakor dan sinkronisasi dgn KKKS di Jatim 100
	c. Fasilitasi Pengembangan Distribusi Gas Kota	Fasilitator dalam percepatan pengembangan pengelolaan gas untuk perumahan	-	Sosialisasi 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt	Sosialisasi 100 Jt	Sosialisasi 100
	d. Kegiatan Penyusunan Direktory & Profil Pengusahaan Pertambangan dan Migas	Updating informasi di bidang pertambangan dan migas hulu.	Profil migas	-	Profil Pertambangan 150 Jt	-	-	-	-

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Kondisi 2013	Target Kinerja, lokasi dan pagu indikatif					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
	e. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pertambangan dan Migas	Sistem informasi pertambangan dan migas yang informatif dan <i>user friendly</i>	-	-	Updating system per tambangan dan migas 100 jt	-	Updating system per tambangan dan migas 100 jt	-	Updating system per tambangan dan migas 100 jt
	f. Kegiatan Rekonsiliasi Lifting dan DBH sektor Migas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rekonsiliasi dan persamaan persepsi dalam perhitungan Lifting sektor Migas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-		Workshop lifting dan DBH 100 jt	Workshop lifting dan DBH 100 jt	Workshop lifting dan DBH 100 jt	Workshop lifting dan DBH 100 jt	Workshop lifting dan DBH 100 jt
	g. Penyusunan Peraturan Perundangan Pertambangan dan Migas	Produk perundangan di bidang pertambangan dan / atau migas	1 perda pertambangan		Sosialisasi perda & per aturan per tambangan 100 jt	Sosialisasi perda & per aturan per tambangan 100 jt	Sosialisasi perda & per aturan per tambangan 100 jt	Sosialisasi perda & per aturan per tambangan 100 jt	Sosialisasi perda & per aturan per tambangan 100 jt
	h. Orientasi dan Peningkatan Aparatur Pengelola Pertambangan dan Migas	Peningkatan SDM sektor pertambangan dan migas	Kursus dan Diklat Serta studi banding		Diklat teknis 100 Jt Studi Banding 200 Jt	Diklat teknis 100 Jt Studi Banding 200 Jt	Diklat teknis 100 Jt Studi Banding 200 Jt	Diklat teknis 100 Jt Studi Banding 200 Jt	Diklat teknis 100 Jt Studi Banding 200 Jt
	i. Sosialisasi, Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Migas	Peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha pertambangan dan migas		38 Kab/Kota se-Jawa Timur Rp. 150 jt	38 Kab/Kota se-Jatim Rp. 150 jt	38 Kab/Kota se-Jatim Rp. 150 jt	38 Kab/Kota se-Jatim Rp. 150 jt	38 Kab/Kota se-Jatim Rp. 150 jt	38 Kab/Kota se-Jatim Rp. 150 jt
	j. Peningkatan SDM Pengelola Usaha Pertambangan	Jumlah Diklat, Sosialisasi dan Seminar bagi aparatur dan pengelola usaha pertambangan	Aparatur dan pelaku usaha 330 orang	330 orang Rp. 420jt	330 orang Rp. 420jt	330 orang Rp. 420jt	380 orang Rp. 480jt	380 orang Rp. 480jt	380 orang Rp. 480jt
	k. Pengawasan dan Monitoring Distribusi BBM dan LPG bersubsidi	Terdistribusikannya BBM dan LPG bersubsidi tepat sasaran	38 Kab/Kota se-Jawa Timur	38 Kab/Kota se-Jawa Timur Rp. 150jt	38 Kab/Kota se-Jawa Timur Rp. 150jt	38 Kab/Kota se-Jawa Timur Rp. 150jt	38 Kab/Kota se-Jawa Timur Rp. 150jt	38 Kab/Kota se-Jawa Timur Rp. 150jt	38 Kab/Kota se-Jawa Timur Rp. 150jt

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada akhir periode masa jabatan digambarkan pada Tabel Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel 4).

Tabel 4
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi tahun 2013	Target Tahun 2014	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1 (2015)	Tahun 2 (2016)	Tahun 3 (2017)	Tahun 4 (2018)	Tahun 5 (2019)	
1.	Jumlah Rumah Tangga Pemakai Listrik PLTMH (KK)	80 KK	100 KK Rp. 1,85 M	400 KK Rp. 4,5 M	200 KK Rp. 2,6 M	250 KK Rp. 2,7 M	250 KK Rp. 2,8 M	300 KK Rp. 3,0 M	1400 KK
2.	Jumlah Rumah Tangga Pemakai PLTS (KK)	32 KK	-	100 KK Rp. 1,0 M	100 KK Rp. 1,0 M	100 KK Rp. 1,0 M	100 KK Rp. 1,0 M	100 KK Rp. 1,0 M	500 KK
3.	Jumlah Rumah Tangga Pemakai Listrik Biogas (KK)	-	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta	1 Paket Rp. 200 Juta	5 Paket
4.	Rasio Elektrifikasi	71,03	71,53	72,03	72,53	73,03	73,53	74,03	
5.	Rasio Rumah Tangga Berlistrik	99,58	99,59	99,60	99,61	99,62	99,63	99,64	
6.	Jumlah Peralatan tambang untuk kelompok pertambangan rakyat/ pertambangan skala kecil	8 kabupaten (Kediri, Blitar, Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, T. Agung, Trenggalek)	Kab. Malang Jember, S.bondo B. woso, B. wangi, Lumajang, Pasuruan	5 Kab/Kota Rp. 500 jt	5 Kab/Kota Rp. 500 jt	5 Kab/Kota Rp. 500 jt	5 Kab/Kota Rp. 500 jt	5 Kab/Kota Rp. 500 jt	25 kab.
7.	Berkurangnya Jumlah Kegiatan PETI	Penertiban PETI Se-Jawa Timur	10 Kab/Kota Rp. 50jt	5 Kab/Kota Rp. 50jt	5 Kab/Kota Rp. 50jt	5 Kab/Kota Rp. 50jt	5 Kab/Kota Rp. 50jt	5 Kab/Kota Rp. 50jt	25 Kab/Kota
8.	Jumlah areal bekas tambang yang direklamasi	6 Ha 3.Kab/Kota Rp. 300 jt	6 Ha 3 Kab/Kota Rp. 300 jt	6 Ha 3 Kab/Kota Rp. 300jt	6 Ha 3 Kab/Kota Rp. 300jt	8Ha 4 Kab/Kota Rp.400jt	8.Ha 4 Kab/Kota Rp. 400jt	8 Ha 4 Kab/Kota Rp. 400jt	36 Ha.

No.	Indikator	Kondisi tahun 2013	Target Tahun 2014	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1 (2015)	Tahun 2 (2016)	Tahun 3 (2017)	Tahun 4 (2018)	Tahun 5 (2019)	
9.	Jumlah Sumur Bor yang dibangun	7 Unit	5 Unit/ 5 kab. Rp. 1.500 Jt	7 Unit / 7 Kab Rp. 2.100 Jt	7 Unit / 7 Kab. Rp. 2.100 Jt	7 Unit / 7 Kab. Rp. 2.100 Jt	7 Unit / 7 Kab. Rp. 1.500 Jt	7 Unit / Kab. Rp. 1.500 Jt	25 Unit
10.	Jumlah Alat Deteksi Longsor di Jawa Timur;	18 Paket	3 Paket 2 Kab. : Rp. 300 Jt	5 Paket 4 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 4 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 4 Kab. : Rp. 500 jt	5 Unit 3 Kab. : Rp. 500 jt	25 Paket
11.	Jumlah Papan Rambu Peringatan Bahaya Longsor / Gerakan Tanah di Jawa Timur;	18 Paket	-	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	5 Paket 3 Kab. : Rp. 500 jt	25 paket

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi & misi Jawa Timur.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, dan dapat menjadi acuan bagi pengelola bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Jawa Timur sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Tahun 2015–2019 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.